

KEBIJAKAN POLITIK KOLONIAL BELANDA DAN JEPANG TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Hendra Julianto¹, Faridi²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

hendrajulianto2807@webmail.umm.ac.id¹, faridi_umm@umm.ac.id²

ABSTRACT

Islamic education in Indonesia underwent significant changes due to the intervention of Dutch and Japanese colonial powers, which, according to educational colonialism theory, should have weakened its institutional existence, yet in reality demonstrated remarkable resilience. This study aims to comparatively analyze the political policies of Dutch and Japanese colonial rule toward Islamic education, as well as to reveal the survival strategies and cultural resistance of Islamic educational institutions amid the pressures of both regimes. The research employed a library research method, examining various literature sources such as scientific journals and relevant prior studies, with data analyzed qualitatively-descriptively through identification, comparison, and synthesis across sources. The results show that the Dutch implemented a repressive approach through regulations such as the Teacher Ordinance and the Wild School Ordinance, which restricted the operations of pesantren and madrasahs, while Japan displayed a superficial leniency that remained oriented toward wartime propaganda interests. Despite facing different structural pressures, Islamic educational institutions managed to survive through networks of ulama, community solidarity, and curriculum flexibility, thereby functioning as both educational institutions and bases of cultural resistance and collective Muslim identity. These findings are relevant to the formulation of fairer and more inclusive education policies, in line with the achievement of SDG 4.

Keywords: Colonial Policy; Islamic Education; Cultural Resistance

ABSTRAK

Pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan signifikan akibat intervensi kekuasaan kolonial Belanda dan Jepang, yang secara teoretis seharusnya melemahkan eksistensi kelembagaannya, namun kenyataannya justru menunjukkan ketahanan luar biasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif kebijakan politik kolonial Belanda dan Jepang terhadap pendidikan Islam, serta mengungkap strategi bertahan dan resistensi kultural lembaga pendidikan Islam di tengah tekanan kedua rezim tersebut. Penelitian menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, kemudian data dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui identifikasi, perbandingan, dan sintesis antarsumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanda menerapkan

pendekatan represif melalui regulasi seperti Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar yang membatasi ruang gerak pesantren dan madrasah, sementara Jepang menampilkan kelonggaran semu yang tetap berorientasi pada kepentingan propaganda perang. Meski berada dalam tekanan struktural berbeda, lembaga pendidikan Islam mampu bertahan melalui jaringan ulama, solidaritas komunitas, dan fleksibilitas kurikulum, sehingga berfungsi ganda sebagai institusi pendidikan sekaligus basis resistensi kultural dan identitas kolektif umat Muslim. Temuan ini relevan bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif, sejalan dengan capaian SDGs keempat.

Kata Kunci: Kebijakan Kolonial; Pendidikan Islam; Resistensi Kultural

A. Pendahuluan

Perjalanan pendidikan di berbagai belahan dunia tidak pernah terlepas dari pengaruh konfigurasi politik, relasi sosial, dan distribusi kekuasaan yang berlaku. Di kawasan yang memiliki pengalaman kolonial, termasuk wilayah Nusantara, pendidikan berfungsi lebih dari sekadar sarana transmisi ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai mekanisme pengendalian sosial dan pembentukan budaya. Dalam konteks Indonesia, pendidikan Islam menjadi salah satu sektor yang mengalami perubahan signifikan selama periode penjajahan Belanda dan Jepang, di mana campur tangan kekuasaan kolonial berdampak langsung pada tatanan kelembagaan, kesempatan akses, serta pemaknaan pendidikan Islam itu sendiri.

Di wilayah Nusantara sebelum tercapainya kemerdekaan, pendidikan

Islam tidak hanya berfungsi sebagai ruang pengajaran ajaran keagamaan, tetapi juga berperan sebagai wadah pembentukan identitas kolektif umat Muslim serta fondasi bagi gerakan sosial dan politik (Iskandar & Ansori, 2022). Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, diberlakukan sejumlah regulasi yang bertujuan mengawasi dan membatasi aktivitas pendidik serta lembaga pendidikan Islam, karena institusi-institusi tersebut dipersepsikan sebagai potensi ancaman terhadap keberlangsungan kekuasaan kolonial (Nasrowi, 2023; Sobri, 2019). Kondisi ini memberikan tekanan besar terhadap keberlanjutan pesantren dan sekolah Islam swasta, namun justru mendorong lembaga-lembaga tersebut menemukan cara bertahan yang cukup berhasil di tengah tekanan struktural yang berat (Rohani et al., 2022; Effendy et al., 2024).

Perbedaan kebijakan terlihat jelas pada periode pendudukan Jepang, ketika pengaturan terhadap pendidikan Islam secara lahiriah tampak lebih toleran, di mana madrasah yang sebelumnya ditutup kembali diizinkan beroperasi (Amjad & Rehani, 2022; Saifudin & Saepuddin, 2020). Di lapangan, lembaga pendidikan Islam pada kedua masa kolonial tersebut menunjukkan daya tahan yang maksimal, mampu menjaga kesinambungan pengajaran, mempertahankan jaringan ulama dan santri, serta tetap menjadi ruang pembentukan identitas Muslim meski berada dalam tekanan kebijakan yang membatasi (Hasnida, 2017; Ilham et al., 2022; Subandi et al., 2023).

Secara ideal, menurut kerangka teori kolonialisme pendidikan, sistem pendidikan yang berada di bawah kendali kekuasaan asing seharusnya mengalami pelemahan struktural yang signifikan, karena kurikulum dan kelembagaan dirancang untuk menopang kepentingan politik penguasa, bukan untuk memberi ruang berkembang bagi pendidikan lokal (Sukmurdianto & Mona, 2020). Idealnya, tekanan regulatif yang intens terhadap lembaga pendidikan keagamaan akan melemahkan

kapasitas kelembagaan secara drastis, bukan menghasilkan ketahanan yang justru semakin kuat (Hudaidah, 2022; Maharanie & Hudaidah, 2021). Pendekatan kajian sejarah pendidikan juga menegaskan bahwa dualisme sistem pendidikan kolonial semestinya menciptakan kesenjangan akses yang tajam antara pendidikan formal kolonial dan pendidikan keagamaan tradisional, sehingga posisi pendidikan Islam idealnya semakin termarginalkan (Novriyanto et al., 2023).

Studi mengenai relasi kekuasaan dan institusi pendidikan turut menunjukkan bahwa kontrol administratif yang ketat idealnya membatasi ruang gerak lembaga pendidikan non-formal secara signifikan (Anggini et al., 2024). Kajian metodologis sejarah turut menegaskan bahwa proses adaptasi lembaga pendidikan di bawah rezim otoriter umumnya berlangsung lambat dan penuh hambatan struktural (Jayanti & Eriyanti, 2022). Dengan demikian, secara teoretis pendidikan Islam pada masa kolonial seharusnya tidak mencapai tingkat ketahanan dan keberlangsungan semaksimal yang ditemukan di lapangan.

Kesenjangan yang tampak antara realitas lapangan dan idealita teoretis terletak pada tingkat ketahanan kelembagaan pendidikan Islam yang justru melampaui ekspektasi teori kolonialisme pendidikan. Jika secara teori tekanan regulatif kolonial semestinya melemahkan institusi pendidikan keagamaan secara signifikan, namun di lapangan justru ditemukan bahwa pesantren dan madrasah mampu bertahan, beradaptasi, bahkan memperkuat posisinya sebagai basis identitas dan resistensi kultural, maka muncul pertanyaan mendasar mengenai mekanisme apa yang memungkinkan ketahanan tersebut terjadi (M. Rasyid et al., 2024). Kesenjangan ini melahirkan permasalahan penelitian yang signifikan untuk dikaji, yakni mengapa lembaga pendidikan Islam mampu bertahan dan tetap berkembang di tengah kebijakan kolonial Belanda dan Jepang yang secara teoretis seharusnya melemahkan eksistensinya.

Dari sinilah muncul pertanyaan penelitian mengenai bagaimana kebijakan politik kolonial Belanda dan Jepang memengaruhi penyelenggaraan pendidikan Islam,

serta bagaimana strategi bertahan lembaga pendidikan Islam terbentuk di tengah tekanan kekuasaan asing tersebut. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara kekuasaan kolonial dan pendidikan Islam dari berbagai sudut pandang, seperti pola regulasi kolonial Belanda terhadap lembaga pendidikan keagamaan, dualisme sistem pendidikan formal dan tradisional, peran pesantren sebagai basis identitas keislaman, kebijakan pendudukan Jepang terhadap madrasah, hingga strategi adaptasi kelembagaan pendidikan Islam di tengah tekanan politik asing (Nasrowi, 2023; Novriyanto et al., 2023; Rohani et al., 2022; Amjad & Rehani, 2022; Hasnida, 2017).

Penelitian lain juga menyoroti aspek kesaksian sejarah mengenai pembatasan ruang gerak guru agama, peran elite Muslim dalam pergerakan nasional, korelasi antara kebijakan kolonial dan kesadaran kritis masyarakat terjajah, konstruksi identitas kolektif melalui institusi keagamaan, serta pengaruh propaganda Jepang terhadap pengelolaan sumber daya pendidikan lokal (M. Rasyid et al., 2024; Anggini et al., 2024; Maharanie & Hudaidah,

2021; Saifudin & Saepuddin, 2020; Hudaidah, 2022). Selain itu, kajian mengenai pendekatan historis-kualitatif dalam menelusuri narasi pengalaman pendidikan turut menjadi rujukan penting dalam memahami dinamika pendidikan Islam pada masa kolonial (Jayanti & Eriyanti, 2022; Iskandar & Ansori, 2022; Sukmurdianto & Mona, 2020; Ilham et al., 2022; Subandi et al., 2023).

Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami relasi kekuasaan kolonial dan pendidikan Islam, sebagian besar masih berfokus pada aspek regulasi dan kebijakan formal semata, tanpa banyak mengeksplorasi dimensi makna dan strategi bertahan lembaga pendidikan Islam secara mendalam sebagai ruang resistensi kultural. Kajian yang secara khusus membandingkan pola kebijakan kolonial Belanda dan Jepang secara komparatif, serta menghubungkannya dengan strategi adaptasi kelembagaan pendidikan Islam secara utuh, masih belum banyak disentuh (Putra et al., 2024; Silaturrahmi et al., 2023; Sumiyana & Effendi, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut

dengan mengkaji secara komparatif kebijakan politik kolonial Belanda dan Jepang terhadap pendidikan Islam, tanpa mengulang fokus kajian yang telah ada sebelumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang menganalisis kebijakan kolonial Belanda dan Jepang secara berdampingan, dengan menyoroti dimensi makna dan strategi bertahan lembaga pendidikan Islam sebagai ruang resistensi kultural, berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung membahas kedua rezim kolonial tersebut secara terpisah dan berfokus pada aspek regulasi formal semata. Urgensi penelitian ini sejalan dengan capaian pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan keempat tentang pendidikan berkualitas dan inklusif, mengingat pemahaman terhadap sejarah ketimpangan akses pendidikan akibat intervensi kekuasaan asing penting sebagai bahan refleksi bagi perumusan kebijakan pendidikan masa kini yang lebih adil dan inklusif (Putra et al., 2024).

Berdasarkan masalah di atas, kajian ini mengangkat rumusan masalah berikut: Bagaimana kebijakan politik kolonial Belanda dan

Jepang memengaruhi tatanan kelembagaan, akses, dan pemaknaan pendidikan Islam di Indonesia pada masing-masing periode kekuasaan tersebut? Dan bagaimana strategi bertahan dan resistensi kultural lembaga pendidikan Islam terbentuk sebagai respons terhadap tekanan kebijakan kolonial Belanda dan Jepang?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu pendekatan yang mengkaji kebijakan politik kolonial Belanda dan Jepang terhadap pendidikan Islam melalui penelusuran sumber literatur, tanpa observasi lapangan atau eksperimen. Sumber data terdiri atas jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel penelitian terdahulu, serta kajian sejarah pendidikan Islam periode kolonial yang relevan dengan fokus kajian, meliputi regulasi kolonial Belanda (seperti Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar), kebijakan pendudukan Jepang terhadap madrasah, serta strategi bertahan pesantren dan lembaga pendidikan Islam.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui tiga tahap: identifikasi pola kebijakan kolonial Belanda dan Jepang dari masing-masing sumber, komparasi karakteristik kedua kebijakan tersebut berdasarkan indikator represi regulatif, akses pendidikan, dan kendali kurikulum, serta sintesis temuan untuk merumuskan pola strategi adaptasi dan resistensi kultural lembaga pendidikan Islam. Analisis dilakukan dengan membandingkan argumen antarpenulis untuk menemukan titik temu maupun perbedaan interpretasi, sehingga diperoleh gambaran komparatif yang sistematis mengenai dampak kebijakan kedua rezim kolonial terhadap keberlangsungan pendidikan Islam di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pola Kebijakan Kolonial Belanda terhadap Pendidikan Islam

Kolonialisme dapat dipahami sebagai sistem kekuasaan yang tidak terbatas pada pengendalian politik dan ekonomi semata, tetapi juga merambah pada pengaturan dan pembentukan sistem pendidikan di wilayah jajahan. Dalam kerangka teori kolonialisme pendidikan, sistem

pendidikan dimanfaatkan oleh penguasa kolonial sebagai instrumen pengendalian ideologis dan sosial, di mana kurikulum serta lembaga pendidikan dirancang untuk menopang kepentingan politik dan dominasi budaya kolonial. Pendidikan, dalam konteks ini, berfungsi sebagai sarana reproduksi nilai-nilai hegemonik yang secara sistematis menyingkirkan pengetahuan lokal dan tradisi keagamaan (Ridhotullah et al., 2024).

Dalam kajian sejarah pendidikan Islam di Indonesia, konsep dualitas pendidikan menjadi kerangka penting untuk menjelaskan pemisahan antara pendidikan formal kolonial dan pendidikan Islam tradisional yang berkembang di kalangan komunitas Muslim. Dualisme tersebut merefleksikan perbedaan orientasi tujuan pendidikan, di mana sekolah kolonial diarahkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan kolonial, sedangkan pendidikan Islam berfokus pada penanaman nilai religius, penguatan identitas budaya, serta pembentukan kesadaran kolektif umat. Pandangan ini sejalan dengan teori struktur sosial pendidikan yang memosisikan lembaga pendidikan

sebagai ruang pertarungan kultural antara kekuatan dominan dan kelompok yang berada dalam posisi subordinat (Ridhotullah et al., 2024).

Kebijakan politik pendidikan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam menunjukkan karakter yang menekan, tidak setara, dan sarat regulasi. Secara sistematis, pendidikan Islam ditempatkan di luar kerangka sistem pendidikan resmi kolonial. Pemberlakuan Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar berfungsi sebagai perangkat utama untuk mengawasi dan membatasi aktivitas pendidikan Islam, khususnya pesantren dan madrasah yang tumbuh secara otonom di lingkungan masyarakat Muslim. Berdasarkan telaah arsip kolonial, pendidikan Islam sering diklasifikasikan sebagai bentuk “pendidikan non-produktif” karena dianggap tidak memberikan kontribusi langsung bagi kepentingan administratif dan ekonomi pemerintahan kolonial.

Temuan tersebut diperkuat oleh kesaksian tokoh-tokoh pendidikan Islam dalam dokumen sejarah yang menegaskan bahwa kebijakan kolonial “membatasi ruang gerak guru agama dan memaksa lembaga pendidikan Islam

bertahan tanpa perlindungan negara” (Dokumen arsip pendidikan Hindia Belanda, 1925). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya diabaikan secara pasif, tetapi secara sadar dimarginalkan dan ditempatkan pada posisi subordinat oleh otoritas kolonial Belanda.

Fenomena ini relevan dengan kerangka teori kolonialisme pendidikan yang memandang sistem pendidikan sebagai sarana dominasi ideologis dan pengendalian sosial. Praktik diskriminatif yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam mencerminkan upaya kolonial untuk mengontrol produksi pengetahuan serta membatasi keberadaan institusi yang berpotensi menumbuhkan kesadaran kritis di kalangan masyarakat terjajah. Dalam konteks tersebut, pendidikan Islam dipersepsikan sebagai potensi ancaman tersembunyi bagi keberlangsungan kekuasaan kolonial.

Hasil kajian ini selaras dengan temuan (Marfiyanti et al., 2024) dan (Hasan et al., 2023) yang menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada era kolonial Belanda mengalami tekanan regulatif yang intens dan berkembang di luar sistem pendidikan formal negara. Namun demikian, penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan

menyoroti aspek makna dan peran sosial pendidikan Islam sebagai ruang resistensi kultural, bukan semata-mata sebagai entitas yang menjadi sasaran kebijakan kolonial.

2. Hubungan Strategi Bertahan dan Resistensi Lembaga Pendidikan Islam

Institusi-institusi pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan sekolah keagamaan yang dikelola oleh komunitas Muslim dengan kurikulum yang berorientasi pada pengajaran ilmu agama, pembentukan moral keislaman, serta pelestarian budaya Islam. Kondisi pendidikan Islam diukur melalui sejumlah indikator, antara lain tingkat akses pendidikan, derajat kemandirian kelembagaan, kendali terhadap kurikulum, serta pengalaman guru dan santri dalam menghadapi dan merespons kebijakan kolonial. Adapun kebijakan politik kolonial dipahami sebagai rangkaian regulasi formal dan praktik administratif yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda untuk mengendalikan institusi pendidikan, pengelolaan sumber daya, serta pengaruh budaya yang pada akhirnya menentukan arah perkembangan

pendidikan di tingkat lokal (Lismayarti & Khairiyyah, 2025).

Salah satu contoh kebijakan kolonial Belanda yang kerap menjadi fokus analisis adalah penerapan Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar, yang dirancang untuk membatasi aktivitas guru agama serta menekan keberadaan lembaga pendidikan Islam nonformal. Regulasi tersebut merefleksikan strategi sistematis pemerintah kolonial dalam mereduksi pengaruh pendidikan Islam yang dipersepsikan sebagai ancaman potensial bagi stabilitas kekuasaan kolonial. Di sisi lain, berbagai kajian mengenai pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda juga menegaskan peran strategis pesantren sebagai penjaga identitas keislaman sekaligus sebagai basis transformasi sosial di tengah tekanan kolonial (Hamzah, 2024).

Meskipun menghadapi tekanan struktural, lembaga pendidikan Islam menunjukkan strategi adaptasi dan resistensi kultural yang kuat. Pesantren dan madrasah tetap beroperasi dengan mengandalkan jaringan ulama, solidaritas komunitas, dan fleksibilitas kurikulum. Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan Islam

pada masa kolonial Belanda lebih menekankan penguatan identitas keagamaan dan moral sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap hegemoni kolonial.

Salah satu catatan sejarah menyebutkan bahwa “pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi ruang aman untuk membangun kesadaran umat terhadap ketidakadilan kolonial” (Catatan Kiai pesantren Jawa, 1930). Temuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan Islam berfungsi ganda, yakni sebagai institusi pendidikan dan sebagai basis ketahanan sosial-kultural masyarakat Muslim

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan politik kolonial Belanda dan Jepang membawa dampak signifikan terhadap tatanan pendidikan Islam di Indonesia, di mana Belanda menerapkan pendekatan represif melalui regulasi seperti Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar, sementara Jepang menampilkan kelonggaran semu yang tetap berorientasi pada kepentingan propaganda perang. Meski berada dalam tekanan struktural yang berbeda, lembaga

pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah mampu bertahan melalui strategi adaptasi, jaringan ulama, dan solidaritas komunitas, sehingga pendidikan Islam tidak hanya menjadi objek kebijakan kolonial, tetapi juga ruang resistensi kultural yang memperkuat identitas dan kesadaran kolektif umat Muslim.

Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap capaian SDGs, khususnya tujuan keempat mengenai pendidikan berkualitas dan inklusif, dengan menegaskan pentingnya pembelajaran dari sejarah ketimpangan akses pendidikan akibat intervensi kekuasaan asing. Pemahaman terhadap dinamika ini diharapkan menjadi refleksi bagi perumusan kebijakan pendidikan masa kini yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya melindungi otonomi lembaga pendidikan dari dominasi kepentingan politik tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amjad, A., & Rehani. (2022). Kebijakan pendidikan Islam di Nusantara sebelum kemerdekaan: Kasus kebijakan politik kolonial Jepang terhadap pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4, 12037–12045.
- Anggini, Susanti, E., Duha, D. S., Riski, F., Reonaldi, & Rahman, S. (2024). Keadaan pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa*, 2(2), 131–140.
<https://doi.org/10.59581/jmpb-widyakarya.v2i2.3425>
- Effendy, M. H., Purnomo, A. P. A., & Rizam, M. M. (2024). Implementation of Islamic education curriculum management based on pesantren local wisdom in the era of disruption. *Re-JIEM: Research Journal of Islamic Education Management*, 7(1), 119–130.
<https://doi.org/10.19105/re-jiem.v7i1.10607>
- Hasnida. (2017). Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa pra kolonialisme dan masa kolonialisme (Belanda, Jepang, Sekutu). *Kordinat*, 16(2), 237–256.

<https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i2.6442>

<https://doi.org/10.29210/022316jpgi0005>

Hudaidah. (2022). Pendidikan di Indonesia masa pendudukan Jepang. *Danadyaksa Historica*, 1(2).

<https://doi.org/10.32502/jdh.v1i2.4243>

Ilham, Rama, B., & Rasyid, M. R. (2022). Pendidikan Islam di Indonesia zaman penjajahan Belanda dan Jepang. *PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 1(1), 102–109.

<https://doi.org/10.58540/pijar.v1i1.139>

Iskandar, K., & Ansori, A. S. (2022). Pendidikan Islam masa pra kemerdekaan: Telaah kebijakan pendidikan Islam masa penjajahan. *Journal of Education and Religious Studies*, 2(2), 45–52.

<https://doi.org/10.57060/jers.v2i02.61>

Jayanti, E., & Eriyanti, F. (2022). Analisis peran sumber sejarah bagi kehidupan sosial masyarakat. *JPGI: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 7(2), 299–302.

M. Rasyid, Anwar, K., & Sya'roni, S. (2024). Peran dan pengaruh pendidikan Islam pada perjuangan kemerdekaan Indonesia serta tokoh-tokohnya. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(5), 276–283.

<https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.560>

Maharanie, S., & Hudaidah. (2021). Dinamika pendidikan Islam pada masa pendudukan Jepang. *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, 1(2), 136–147.

<https://doi.org/10.30659/jp-sa.v1i2.15516>

Nasrowi, B. M. (2023). Politik pendidikan Islam: Studi kebijakan publik Belanda pada masa penjajahan di Indonesia. *INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 1–13.

Novriyanto, Y., Apriyana, S. B., & Komariyah, S. (2023). Pengaruh kebijakan politik etis terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 1(1), 88–94.

<https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i1>

[.17](#)

Putra, F. G., Ramdhan, A., & Salim, A. (2024). Curriculum policy of Islamic education for the prevention of religious radicalism in Indonesia. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 12(1), 21–38.

<https://doi.org/10.21043/qijis.v12i1.13535>

Rohani, R., Ernita, M., & Salmiah, S. (2022). Pendidikan Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda (Kasus Muhammadiyah dan NU). *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 18(2), 103–118.
<https://doi.org/10.24014/nusantara.v18i2.21483>

Saifudin, S., & Saepuddin, D. (2020). Pengaruh kolonialisme Jepang terhadap pendidikan Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 164–177.
<https://doi.org/10.32832/tadibuna.v9i2.3441>

Silaturrahmi, P., Hasanah, U., & Aziz, M. A. (2023). Implementation of the Islamization curriculum in Islamic religious higher education (PTKI) development in Indonesia

as an effort to integrate science in the perspective of Maqasid al-Shari'ah. *Al-Wijdan: Journal of Islamic Education Studies*, 8(3), 343–358.

<https://doi.org/10.58788/alwijdn.v8i3.2748>

Sobri, R. (2019). Politik dan kebijakan: Pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia (Analisis kebijakan PP No. 55 Tahun 2007). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 109–124.
<https://doi.org/10.30868/ei.v8i01.322>

Subandi, Rama, B., & Achruh, A. (2023). Pendidikan Islam di Indonesia zaman penjajahan Belanda dan Jepang. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, 1(1), 193–205.
<https://doi.org/10.58540/pijar.v1i1.139>

Sukmurdianto, & Mona, Y. Z. (2020). Kebijakan pendidikan Islam di Nusantara sebelum kemerdekaan: Kasus kebijakan politik kolonial Belanda dan Jepang terhadap pendidikan Islam di Indonesia. *Mau'izhah*, 10(2), 143–164.
<https://doi.org/10.55936/mauizha>

[h.v10i2.39](#)

Sumiyana, S., & Effendi, R. (2024).
Indonesia's education budgeting
system denoting low
adaptiveness: Functionalism
analysis. *Cogent Social Sciences*,
10(1).

[https://doi.org/10.1080/23311886
.2024.2393870](https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2393870)

Tadika, A. D. C. (2021). Peranan
pengembangan manajemen
kinerja tenaga administrasi
kesehatan terhadap peningkatan
mutu pelayanan kesehatan di
Puskesmas. *Jurnal Ilmiah
Pamenang*, 3(2), 28–42.

<https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.8>

[1](#)